

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KETEGASAN TUJUAN, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN DI KABUPATEN NIAS SELATAN: PERAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATOR

Oleh :

Samanoi Halowo Fau

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nias Raya
email: samfau16@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 23 Juli 2025

Revisi, 22 Agustus 2025

Diterima, 14 September 2025

Publish, 15 September 2025

Kata Kunci :

Partisipasi Anggaran,
Kejelasan Tujuan Anggaran,
Akuntabilitas,
Realisasi Anggaran,
Komitmen Organisasi.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan target anggaran, dan akuntabilitas terhadap realisasi anggaran, dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderator di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Populasi penelitian terdiri dari 189 responden yang diambil dari 63 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Teknik sampling yang digunakan adalah sampling purposif, di mana seluruh populasi digunakan sebagai sampel penelitian, dengan total 189 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan skala Likert sebagai alat ukur utama untuk menilai persepsi responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran, sementara kejelasan target anggaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran di Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, akuntabilitas memiliki efek positif dan signifikan terhadap realisasi anggaran. Namun, komitmen organisasi tidak mampu memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan realisasi anggaran, serta antara akuntabilitas dan realisasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Samanoi Halowo Fau

Afiliasi: Universitas Nias Raya

Email: samfau16@gmail.com

1. PENDAHULUAN

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur merupakan target utama dari APBD. Pemerintah bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan pengeluaran agar stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tetap terjaga tanpa bantuan luar negeri. Ini berarti pengeluaran total tidak boleh melebihi pendapatan total (surplus) (Alimudin Pohan; Muhammad Yafiz, 2023) Penyusunan anggaran merupakan elemen penting dalam pengelolaan instansi pemerintah untuk mencapai hasil maksimal. Anggaran yang baik berfungsi sebagai sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Untuk itu, instansi pemerintah

membutuhkan pimpinan yang efektif dan efisien untuk mengelola instansi dengan baik guna mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Salah satu alat bantu yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Sayuti et al., 2018)

APBD adalah alat untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran serta implementasi perencanaan pembangunan. Ini juga memberi otorisasi pengeluaran, standar untuk evaluasi realisasi anggaran, memobilisasi pegawai, dan koordinasi aktivitas di berbagai unit kerja. Perencanaan APBD memerlukan partisipasi aktif untuk mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sebagaimana tercantum dalam RKPD. (Wance, 2019)

Realisasi Anggaran adalah bagian dari laporan keuangan pemerintah yang menampilkan informasi

tentang pencapaian dan alokasi anggaran entitas pelaporan dalam periode tertentu. Tujuannya adalah memberikan informasi tentang pencapaian dan alokasi anggaran secara terperinci. Penbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan sejauh mana target yang disepakati antara legislatif dan eksekutif telah tercapai sesuai peraturan perundang-undangan (Sheila & Rahmi, 2023). Terdapat dua pendekatan anggaran yang digunakan: Anggaran yang Disediakan (*imposed budget*) dan Anggaran Partisipatif (*participative budgets*). Pendekatan *imposed budgets* disusun oleh manajemen puncak atau komite anggaran tanpa konsultasi dari level menengah dan bawah, yang sering disebut pendekatan *top down approach*. Kelebihannya adalah biaya dan waktu penyusunan yang lebih efisien karena melibatkan sedikit orang (Sheila & Rahmi, 2023).

Penyerapan anggaran yang baik terlihat dari tingkat pelaksanaan fisik dan kepatuhan pada rencana kerja selama satu tahun anggaran. Pada pertengahan tahun, seharusnya penyerapan anggaran sudah mencapai 50% dan dapat maksimal mencapai 100% di akhir tahun. Namun, seringkali terjadi lambatnya penyerapan anggaran dengan rendahnya penyerapan di awal tahun dan penumpukan di akhir tahun. (Oktaliza et al., 2020). Fenomena serupa terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, seperti yang terlihat dalam tabel realisasi anggaran belanja pendapatan dan barang dari 2016 hingga 2021 di bawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran	Total Realisasi	Rasio Efektivitas
1	2016	982.178.816.233,23	810.002.815.632,78	82,47
2	2017	1.197.570.833.423,12	1.066.164.746.908,50	89,03
3	2018	973.636.004.582,71	877.213.285.747,40	90,10
4	2019	1.088.364.437.746,63	954.075.863.963,57	87,66
5	2020	1.179.468.781.738,14	1.060.601.781.158,26	89,92
6	2021	298.118.808.474,00	245.107.576.769,17	82,22

Sumber: Pengelola Keuangan SKPD Kabupaten Nias Selatan

Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2021

No	Tahun	Anggaran	Total Realisasi	Rasio Efektivitas
1	2016	1.118.389.986.122,60	1.008.887.209.661,00	90,21
2	2017	1.257.325.334.886,18	1.126.563.468.536,07	89,60
3	2018	1.228.961.604.859,00	1.164.834.186.729,02	94,78
4	2019	1.395.972.683.504,00	1.311.187.399.569,75	93,93
5	2020	1.483.534.952.584	1.459.870.566.296	98,40

6	2021	1.461.332.092.084,80	1.401.145.247.615,50	95,88
---	------	----------------------	----------------------	-------

Sumber: Pengelola Keuangan SKPD Kabupaten Nias Selatan

Berdasarkan data tabel 1.1, realisasi belanja dari tahun 2016-2021 menunjukkan selisih yang tidak menguntungkan karena nilai realisasi tidak mencapai atau melebihi anggaran. Jika pencapaian realisasi belanja antara 90%-100%, anggaran dianggap kurang efisien. Tabel 1.2 menunjukkan ketidakefektifan anggaran Pemerintah Kabupaten Nias Selatan karena nilai persentase realisasi tidak mencapai 100%, sementara Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa efektivitas penyusunan anggaran mencapai 100% menunjukkan tingkat pencapaian hasil program sesuai target (Mardiasmo, 2018).

Data tabel menunjukkan bahwa perencanaan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan belum berjalan baik, karena setiap tahun anggaran pendapatan dan belanja meningkat, tetapi realisasinya tidak sesuai. Hal ini menunjukkan kekurangan dalam menghasilkan realisasi anggaran manajerial yang baik. Perencanaan seharusnya memberikan pedoman dan tata cara pelaksanaan tujuan, kebijakan, prosedur, penganggaran, dan program kerja agar terlaksana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. (Hidayat, 2017).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi daerah, tergantung pada perubahan kebutuhan masyarakat. Jika ekonomi masyarakat kurang baik, maka PDRB dan realisasi pendapatan tidak akan meningkat. Mengukur daya serap melibatkan lebih dari sekadar membandingkan dana yang tersedia dengan pengeluaran aktual; kendala daya serap dapat menyebabkan realokasi dana atau kegagalan melaksanakan rencana kerja. (Ramdhani & Anisa, 2017). Partisipasi anggaran adalah keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran pada pusat pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan (Purwaningsih, 2022). (Ginting, 2018).

Menurut Mardiasmo, kejelasan sasaran anggaran sebagai bentuk dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik (Luthfiani et al., 2020). Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai Realisasi Anggaran yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran merupakan tujuan anggaran yaitu sebagai alat perencanaan, dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi suatu organisasi dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Atika et al., 2019). Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai bentuk dari desakan psikologi yang meyakinkan seseorang berupaya untuk menerangkan seluruh langkah serta kepastian yang diambil dalam suatu kondisi (Pane et al., 2021).

Komitmen organisasi adalah keterikatan individu dengan organisasi, sehingga individu tersebut merasa memiliki dan berusaha mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, memiliki persepsi yang positif dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Sebaliknya, pegawai dengan komitmen organisasi yang rendah akan memiliki perhatian yang rendah untuk mencapai tujuan organisasi, bahkan cenderung mencoba memenuhi kepentingan pribadi (Sirin et al., 2020).

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan komitmen organisasi adalah rendahnya komitmen para pegawai akan mengganggu kegiatan pelaksanaan program pemerintah daerah, akibatnya terjadi ketidakdisiplinan pegawai. Selanjutnya tidak adanya keinginan dan kesiapan individu dalam organisasi untuk menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab pekerjaan, serta menyebabkan pengembangan diri dan kreativitas pegawai menjadi menurun. Diperlukan adanya pendekatan kontinjensi dengan variabel intervening atau variabel moderating yang harus dipertimbangkan dalam hubungan antara anggaran partisipatif dan kejelasan sasaran dengan realisasi anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Mauliza yang menunjukkan hasil penelitian bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Semakin baik partisipasi anggaran yang tersedia, semakin tinggi kinerja manajerial. Akuntabilitas mempengaruhi kinerja manajerial. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin tinggi pula tingkat kinerja manajerial. Kejelasan target anggaran mempengaruhi kinerja manajerial. Semakin tinggi tingkat kejelasan target anggaran, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja manajerial. Komitmen organisasi memoderasi pengaruh partisipasi anggaran, akuntabilitas dan kejelasan target anggaran terhadap kinerja manajerial. Komitmen organisasi memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja manajerial. Komitmen organisasi memoderasi pengaruh target anggaran yang jelas terhadap kinerja manajerial (Utami & Haryati, 2023) (Mauliza et al., 2022)

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada realisasi anggaran, karena kombinasi antara partisipasi, kejelasan sasaran dan akuntabilitas dengan komitmen organisasi yang diharapkan dapat memenuhi prasarat kondisional atau efektif agar meningkatkan realisasi anggaran.

Kerangka Teoritis

Teori agensi, diperkenalkan oleh Alchian dan Demsetz pada tahun 1972 serta oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, menggambarkan kontrak antara manajer (agent) dan investor (principal) sebagai hubungan keagenan (Lesmono & Siregar, 2021). Menurut Jensen dan Meckling, hubungan ini merupakan konflik kepentingan karena setiap individu dipandu oleh motif kepentingan pribadi. Scott & O'Brien mengungkapkan bahwa Teori Agensi merancang kontrak untuk menyelaraskan kepentingan principal dan agent. Teori keagenan, menurut Supriyono, adalah kontrak antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak) di mana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mencapai tujuan tertentu (Supriyono et al., 2018). Agen bertanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut dan dapat menerima balas jasa. Dalam konteks perusahaan, prinsipal adalah pemegang saham dan agen adalah manajemen puncak. Teori ini mengatasi masalah konflik kepentingan dengan berbagai mekanisme tata kelola, seperti menggunakan jasa auditor (Hendrastuti & Harahap, 2023). Asumsinya adalah adanya tujuan yang berbeda antara prinsipal dan agen, sehingga terjadi konflik jika agen bertindak demi kepentingannya sendiri (Hendrastuti & Harahap, 2023).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu pertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajer dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Ayem & Nugroho, 2020)

Partisipasi anggaran, sebagai metode penganggaran, menitikberatkan pada usaha meningkatkan motivasi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi (Iriany Dewi Soleiman, 2023). Konsep ini telah berkembang pesat di sektor bisnis, melampaui implementasinya di sektor publik. Anggaran, sebagai pernyataan estimasi kinerja organisasi dalam ukuran finansial selama periode tertentu, dapat memengaruhi dinamika internal perusahaan. Jika anggaran ditetapkan terlalu tinggi, dapat menimbulkan sikap agresif dari manajer level bawah terhadap manajer level atas, berpotensi menyebabkan ketidakcapaian target anggaran. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak partisipasi anggaran dalam mencapai efektivitas organisasi. (Sukamto, 2019).

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Amin (Amin, 2022), (Mauliza et al., 2022) yang membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap realisasi anggaran. Jika suatu

instansi memberikan kesempatan karyawan untuk berpartisipasi menyusun anggaran, maka proses ini disebut sebagai partisipasi anggaran (R. Sari & Muliya, 2019), (Sukamto, 2019).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: partisipasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

H1: Partisipasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik yang bertujuan agar dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pencapaiannya (Kartika & Sukamto, 2019). Anggaran yang jelas dapat membantu para manajer dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengendalian sehingga tujuan organisasi tercapai dengan baik. Semakin tepat dalam membidik sasaran anggaran, maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja suatu instansi (Kartika & Sukamto, 2019). Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Amin (Amin, 2022) yang membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap realisasi anggaran. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: kejelasan sasaran berpengaruh positif signifikan terhadap Realisasi anggaran Daerah, dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kejelasan Sasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut. Adanya akuntabilitas publik tentunya dapat meningkatkan kinerja manajerial karena semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan semakin baik pula kinerjanya mencapai tujuan organisasi. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Siswiraningtyas; Anggraeni Nur & Yuhertiana, 2021). Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan dan hak menurut pertanggungjawaban (Wardani & Silvia, 2021). Akuntabilitas secara

parsial terhadap Realisasi Anggaran pemerintah daerah dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H3 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Realisasi Anggaran pemerintah Daerah

Partisipasi dalam komitmen organisasi diperlukan dengan harapan dapat memberikan informasi yang sesuai untuk tercapainya suatu tujuan, sehingga anggaran tidak hanya dibuat oleh manajemen namun akan kesulitan ketika diterapkan karena tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter (Siswiraningtyas; Anggraeni Nur & Yuhertiana, 2021). Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran belanja dan pendapatan daerah entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Realisasi anggaran juga perlu dilakukan untuk maksud mencari kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan dalam anggaran tersebut. Realisasi anggaran pada dasarnya adalah proses membandingkan antara anggaran yang disusun dengan pelaksanaannya, sehingga dari perbandingan ini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (Pratiwi et al., 2019). Komitmen organisasi merupakan suatu keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota dari sebuah organisasi, ditunjukkan dengan adanya loyalitas dari para manajer secara terus menerus kepada organisasi demi keberhasilan dan kesejahteraan organisasinya. Manajer yang memiliki komitmen yang tinggi akan memiliki pandangan positif dan lebih berusaha untuk berbuat lebih baik lagi untuk kepentingan perusahaannya.(Kharisma P et al., 2021), (Anggreni & Dewi, 2022).

H4 : Komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Realisasi Anggaran Keuangan Daerah.

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Ketidakjelasan sasaran anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi (Anggreni & Dewi, 2022). Komitmen mencakup penerimaan dan kepercayaan akan nilai dan tujuan organisasi, perasaan, keterlibatan dan rasa kesetiaan terhadap organisasi (Rizal et al., 2023)

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Amin (Amin, 2022) menunjukkan bahwa

komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh Kejelasan sasaran anggaran terhadap realisasi anggaran. Komitmen organisasi, sebagai variabel yang memoderasi, memainkan peran dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara kejelasan sasaran dan kinerja laporan keuangan daerah. Tingkat komitmen individu atau lembaga dalam organisasi pemerintah daerah dapat memperkuat pengaruh kejelasan sasaran terhadap kinerja laporan keuangan. Dengan demikian, kejelasan sasaran dapat memengaruhi kinerja laporan keuangan daerah dan pengaruhnya dapat dipengaruhi oleh tingkat komitmen organisasi. Ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan bagaimana kejelasan sasaran keuangan dapat diperkuat oleh komitmen individu atau lembaga dalam organisasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Berikut ini adalah rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H5 : Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh Kejelasan Sasaran terhadap Realisasi Anggaran Daerah.

Komitmen organisasi yang kuat akan memungkinkan semua anggota organisasi bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spritual tambahan yang bisa diperoleh. Anggota organisasi condong dalam perilaku patuh hukum yang menurut mereka sesuai dan kontinyu dengan norma-norma dalam diri mereka, yakni komitmen normatif yang melalui individual moralitas. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi sangat penting untuk memotivasi pegawai aparatur pemerintah untuk bekerja sesuai dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan anggaran (Dewi et al., 2019)

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran daerah. Pengaruh akuntabilitas terhadap realisasi anggaran daerah dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi (Simamora, 2019). Tingkat komitmen individu atau lembaga dalam organisasi pemerintah daerah dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara akuntabilitas dan realisasi anggaran (Mauliza et al., 2022). Komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dapat mendorong individu atau tim untuk lebih fokus dan bertanggung jawab dalam menjalankan pengelolaan anggaran, yang pada gilirannya dapat memperkuat realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H6 : Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Realisasi Anggran Daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang mencakup populasi 63 Unit Kerja Regional (SKPD).

Menggunakan metode cluster sampling (Rachman et al., 2024), sampel sebanyak 38 SKPD dipilih. Desain penelitian melibatkan pengumpulan data dari populasi target yang memenuhi kriteria penelitian tertentu. Ini diikuti oleh pengumpulan data melalui instrumen yang valid dan reliabel, dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden berdasarkan persepsi mereka di masing-masing SKPD. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) untuk mendapatkan hasil empiris.

Kelayakan model dinilai melalui dua bagian utama: uji model luar dan uji model dalam. Uji model luar mencakup penilaian validitas konvergen, di mana nilai faktor loading pada variabel laten dengan indikator yang diharapkan harus melebihi 0,70. Validitas diskriminan dievaluasi dengan faktor loading silang, membandingkan nilai loading dalam konstruk yang dimaksud dengan nilai loading pada konstruk lainnya. Sebuah konstruk dianggap reliabel jika keandalannya melebihi 0,70, didukung oleh pandangan koefisien laten. Selain itu, Average Variance Extracted (AVE) diharapkan melebihi 0,50. Alpha Cronbach digunakan untuk memperkuat hasil keandalan gabungan, dengan nilai lebih dari 0,70 menunjukkan keandalan.

Uji Model Struktural (Inner Model) mencakup beberapa penilaian: koefisien determinasi (R^2) mengukur varians konstruk endogen. Interpretasi membagi nilai R^2 menjadi 0,67 sebagai substansial, 0,33 sebagai moderat, dan 0,19 sebagai lemah. Relevansi Prediktif (Q^2 atau Stone-Geisser's) menguji kemampuan prediktif model, dengan nilai yang menunjukkan relevansi prediksi kecil (0,02), sedang (0,15), dan besar (0,35). Indeks Kesesuaian Model (GoF) menentukan kecukupan model, di mana nilai f-square sebesar 0,02 mewakili efek kecil, 0,15 efek moderat, dan 0,35 efek besar pada tingkat struktural.

Pengujian Hipotesis menggunakan ukuran statistik dengan alpha sebesar 5%. Kriteria untuk menerima atau menolak hipotesis didasarkan pada t-statistik, di mana H_a diterima dan H_0 ditolak ketika t-statistik > 1,96. Probabilitas juga dipertimbangkan, dengan H_a diterima jika nilai p-value < 0,05 untuk menerima/menolak hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji model pengukuran melibatkan evaluasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Proses evaluasi ini dilakukan melalui dua tahap utama:

Validitas Konvergen (Convergent Validity):

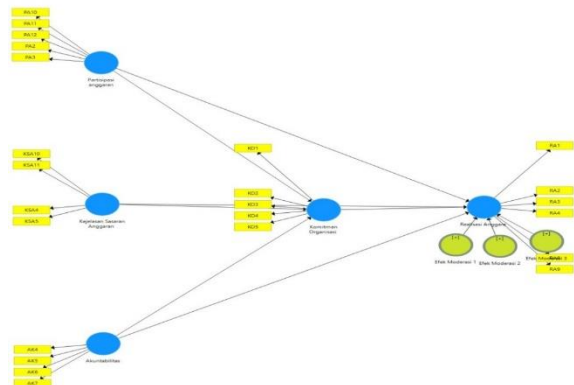
Dinilai berdasarkan nilai loading factor untuk setiap konstruk, yang memastikan bahwa indikator mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara memadai. Nilai loading factor yang tinggi menunjukkan hubungan yang kuat antara konstruk dan indikator-indikatornya.

Validitas Diskriminan (Discriminant Validity):

Dievaluasi menggunakan hasil dari composite reliability atau Cronbach's alpha. Penilaian ini menentukan sejauh mana konstruk yang diuji benar-benar berbeda satu sama lain. Nilai composite reliability atau Cronbach's alpha yang tinggi menunjukkan konsistensi internal dan reliabilitas yang lebih baik dalam satu konstruk.

Selain itu, Average Variance Extracted (AVE) juga dihitung untuk menentukan jumlah varians yang ditangkap oleh indikator konstruk relatif terhadap kesalahan pengukuran. Nilai AVE yang tinggi (> 0,50) menunjukkan bahwa konstruk tersebut mampu merepresentasikan indikator-indikatornya secara memadai dan memiliki validitas konvergen yang kuat. **Convergent validity**

Berdasarkan hasil evaluasi convergent validity melalui *outer loading factor* pada setiap indikator konstruk yang terdapat pada tiap variabel melalui loading factor yang disajikan pada gambar 1 dibawah diketahui bahwa setiap indikator konstruk memiliki nilai diatas 0,70, sehingga dinyatakan valid, hasil *outer loading factor* kedua dapat dikemukakan pada gambar berikut ini:



Gambar 1 *Outer Loading Factor*

Sumber : *Output SmartPLS, 2025*

a. Uji Discriminant Validity

Discriminant validity bertujuan untuk melihat konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik dari konstruk lainnya. *Discriminant validity* dalam penelitian ini dilakukan dengan dilihat berdasarkan nilai *average variance extracted* (AVE), maka nilai *average variance extracted* (AVE) harus lebih dari 0,50 (Joseph F. Hair et al., 2019). Hasil uji *discriminant validity* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Uji *Discriminant Validity*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Partisipasi Anggaran	0.918	0.937	0.938	0.751

(X1)				
Kejelasan Sasaran (X2)	0.866	0.889	0.907	0.708
Akuntabilitas (X3)	0.914	0.919	0.940	0.797
Realisasi Anggaran (Y)	0.936	0.955	0.950	0.762
Komitmen Organisasi (Z)	0.940	0.943	0.955	0.808

Sumber : *Output SmartPLS, 2025*

Hasil uji *discriminant validity* pada tabel 1 dilihat berdasarkan nilai rata-rata yang diekstraksi (AVE) dan dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

- Variabel partisipasi anggaran (X1) diperoleh nilai *average variance extracted* (AVE) yaitu sebesar 0.751 lebih besar dari 0,50 (0.751 > AVE 0.50). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran (X1) memenuhi nilai *average variance extracted* (AVE).
- Variabel kejelasan sasaran (X2) diperoleh nilai *average variance extracted* (AVE) yaitu sebesar 0.708 lebih besar dari 0,50 (0.708 > AVE 0.50). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran (X2) memenuhi nilai *average variance extracted* (AVE).
- Variabel akuntabilitas (X3) diperoleh nilai *average variance extracted* (AVE) yaitu sebesar 0.797 lebih besar dari 0,50 (0.797 > AVE 0.50). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X3) memenuhi nilai *average variance extracted* (AVE).
- Variabel realisasi anggaran (Y) diperoleh nilai *average variance extracted* (AVE) yaitu sebesar 0.762 lebih besar dari 0,50 (0.762 > AVE 0.50). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel realisasi anggaran (Y) memenuhi nilai *average variance extracted* (AVE).
- Variabel komitmen organisasi (Z) diperoleh nilai *average variance extracted* (AVE) yaitu sebesar 0.808 lebih besar dari 0,50 (0.808 > AVE 0.50). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi (Y) memenuhi nilai *average variance extracted* (AVE).

a. Uji Composite Reability

Uji *composite reliability* bertujuan untuk mengetahui reliabilitas dari suatu konstruk. Uji *composite reliability* dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas komposit dan *cronbach's alpha* dengan nilai lebih besar dari 0,70 dapat dinyatakan memenuhi *composite reliability* (Ghozali, 2015:25). Hasil uji *composite reliability* disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Uji *Composite Reability*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Partisipasi Anggaran (X1)	0.918	0.937	0.938	0.751
Kejelasan Sasaran (X2)	0.866	0.889	0.907	0.708
Akuntabilitas (X3)	0.914	0.919	0.940	0.797

Realisasi Anggaran (Y)	0.936	0.955	0.950	0.762
Komitmen Organisasi (Z)	0.940	0.943	0.955	0.808

Sumber : *Output SmartPLS*, 2025

Hasil uji *composite reliability* dalam penelitian ini dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

- Variabel partisipasi anggaran (X1) diperoleh nilai *composite reliability* sebesar 0,938 lebih besar dari 0,7 ($0,938 > 0,7$) dan *cronbach's alpha* sebesar 0,918 lebih besar dari 0,7 ($0,918 > 0,7$), maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel partisipasi anggaran (X1) dinyatakan reliabel.
- Variabel kejelasan sasaran (X2) diperoleh nilai *composite reliability* sebesar 0,907 lebih besar dari 0,7 ($0,907 > 0,7$) dan *cronbach's alpha* sebesar 0,866 lebih besar dari 0,7 ($0,866 > 0,7$), maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel kejelasan sasaran (X2) dinyatakan reliabel.
- Variabel akuntabilitas (X3) diperoleh nilai *composite reliability* sebesar 0,940 lebih besar dari 0,7 ($0,940 > 0,7$) dan *cronbach's alpha* sebesar 0,936 lebih besar dari 0,7 ($0,936 > 0,7$), maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel akuntabilitas (X3) dinyatakan reliabel.
- Variabel realisasi anggaran (Y) diperoleh nilai *composite reliability* sebesar 0,950 lebih besar dari 0,7 ($0,950 > 0,7$) dan *cronbach's alpha* sebesar 0,936 lebih besar dari 0,7 ($0,936 > 0,7$), maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel realisasi anggaran (Y) dinyatakan reliabel.
- Variabel komitmen organisasi (Z) diperoleh nilai *composite reliability* sebesar 0,955 lebih besar dari 0,7 ($0,955 > 0,7$) dan *cronbach's alpha* sebesar 0,940 lebih besar dari 0,7 ($0,940 > 0,7$), maka dapat disimpulkan bahwa pada komitmen organisasi (Z) dinyatakan reliabel.

1. Uji Structural Model (*Inner Model*)

Inner model menggambarkan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk yang dibangun berdasarkan substansi teori (Ghozali, 2015:25).. Hasil uji *inner model* dalam penelitian ini dilihat melalui nilai R-square dan uji signifikansi *t statistic*. Hasil uji inner model dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Uji R-Square

R-square bertujuan untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Adjust R-Square digunakan untuk melihat bagaimana variabel independent menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2015:76). Nilai R-square memiliki kriteria apabila nilai R-square sebesar 0,02 maka menunjukkan pengaruh kecil, nilai 0,15 menunjukkan pengaruh moderat dan nilai 0,35 menunjukkan pengaruh besar pada level struktural. Hasil uji R-square dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. R-Square

R Square	Adjusted R Square
----------	-------------------

Realisasi Anggaran (Y)	0.720	0.714
------------------------	-------	-------

Sumber: Hasil *Output SmartPLS*, 2025

Hasil uji *R-square* padavariabel realisasi anggaran (Y) diperoleh nilai *R-square* sebesar 0,720. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan sasaran, akuntabilitas dan komitmen organisasi memberikan pengaruh yang besar dalam memprediksi variabel realisasi anggaran (Y) sebesar 72.0%.

1. Uji Signifikansi T-Statistic

Uji signifikan *t-statistic* menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2015:97). Uji signifikansi *t-statistic* dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% serta membandingkan nilai *t-statistic* dengan t-tabel. Nilai t-tabel diperoleh berdasarkan rumus $df = n - k = 189 - 5 = 184$, maka diperoleh nilai ttabel sebesar 1.97294. Hasil uji signifikansi *t-statistic* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4 Uji Signifikansi T-Statistic

Pernyataan	Samp el asli (O)	Rata-rata samp el (M)	Stan dar Deviasi (STD EV)	T statisti k (O/ST DEV)	Nilai P (P value s)	Inter preta si
Partisipasi anggaran -> Realisasi Anggaran	0.364	0.352	0.107	3.394	0.001	Signif ikan
Kejelasan Sasaran Anggaran -> Realisasi Anggaran	0.168	0.173	0.104	1.616	0.107	Tidak Signif ikan
Akuntabilit as -> Realisasi Anggaran	0.826	0.829	0.061	13.548	0.000	Signif ikan
X1*M -> Realisasi Anggaran	0.020	0.027	0.062	0.323	0.747	Tidak Signif ikan
X2*M -> Realisasi Anggaran	-	-	0.064	0.871	0.384	Tidak Signif ikan
X3*M -> Realisasi Anggaran	0.088	0.089	0.057	1.543	0.123	Tidak Signif ikan

Sumber : *Output SamrtPLS*, 2025

Hasil uji signifikansi *t-statistic* pada tabel 4 dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

- Variabel partisipasi anggaran (X1) diperoleh nilai *t-statistic* sebesar 3.394 dan signifikansi sebesar 0.001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* lebih besar dari 1.97294 ($3.394 > 1.97294$) serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.001 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan
- Variabel Kejelasan sasaran anggaran (X2) diperoleh nilai *t-statistic* sebesar 1.616 dan signifikansi sebesar 0.107. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* lebih kecil dari 1.97294 ($1.616 > 1.97294$) serta nilai signifikansi lebih

- kecil dari 0,05 ($0.107 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan
- c. Variabel Akuntabilitas (X3) diperoleh nilai t-statistic sebesar 13.548 dan signifikansi sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistic lebih besar dari 1.97294 ($13.548 > 1.97294$) serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X3) berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan
 - d. Variabel Komitmen organisasi (M) dalam memoderasi pengaruh partisipasi anggaran (X1) terhadap realisasi anggaran (Y) diperoleh nilai t-statistic sebesar 0.323 dan signifikansi sebesar 0.747. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistic lebih kecil dari 1.97294 ($0.323 > 1.97294$) serta nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.747 > 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen organisasi (M) tidak dapat memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan
 - e. Variabel Komitmen organisasi (M) dalam memoderasi kejelasan sasaran anggaran (X2) terhadap realisasi anggaran (Y) diperoleh nilai t-statistic sebesar 0,871 dan signifikansi sebesar 0,384. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistic lebih kecil dari 1.97294 ($0.871 > 1.97294$) serta nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0.384 > 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan
 - f. Variabel Komitmen organisasi (M) dalam memoderasi pengaruh akuntabilitas (X3) terhadap realisasi anggaran (Y) diperoleh nilai t-statistic sebesar 1.543 dan signifikansi sebesar 0.123. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistic lebih kecil dari 1.97294 ($1.543 > 1.97294$) serta nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.123 > 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi (M) tidak dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan

4. Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Realisasi Anggaran

Hasil penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap realisasi anggaran diperoleh nilai t-statistic sebesar 3.394 dan signifikansi sebesar 0.001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistic lebih besar dari 1.97294 ($3.394 > 1.97294$) serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.001 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan.

Partisipasi anggaran adalah keterlibatan bawahan diseluruh unit organisasi atau pusat

pertanggungjawaban dalam proses penyusunan anggaran. Pada umumnya, bawahan atau manajer pusat pertanggungjawaban akan tampil lebih baik dan berupaya keras untuk mencapai target anggaran apabila sebelumnya mereka dilibatkan dalam proses penetapan anggaran tersebut. Partisipasi anggaran memberikan keyakinan bagi bawahan bahwa yang menjadi target perusahaan merupakan anggaran yang mereka susun sehingga harus dilaksanakan dan dicapai dengan baik, bukan anggaran yang dipaksakan oleh atasan kepada mereka. Nurasyid (dalam Basyir, Akhmad Azmi) menyatakan bahwa partisipasi anggaran adalah seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam proses penyusunan anggaran dengan adanya partisipasi anggaran maka dapat terjadi keselarasan tujuan organisasi (Basyir, 2016).

Sejalan dengan teori *Decision-Usefulness Theory*. Teori ini menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kegunaan informasi anggaran bagi pengambilan keputusan. Hal ini karena partisipasi memungkinkan para manajer untuk memberikan masukan dan informasi yang relevan untuk penyusunan anggaran. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Audia, F. Mellyanda dan Bambang Jatmiko menyatakan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan reputasi berpengaruh positif signifikan terhadap senjangan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (Audia & Jatmiko, 2017). Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jannah, Miftahul dan Sri Rahayu menyatakan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh pada kinerja manajerial dengan kejelasan sasaran anggaran, komitmen tujuan anggaran, keadilan distributif, dan pengawasan internal (Jannah & Rahayu, 2015)

2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran (X2) diperoleh nilai t-statistic sebesar 1.616 dan signifikansi sebesar 0.107. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistic lebih kecil dari 1.97294 ($1.616 > 1.97294$) serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0.107 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan.

Menurut Ahmad Rudi (dalam Simamora) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Simamora, 2019). Kejelasan sasaran anggaran adalah tujuan dari suatu rencana anggaran yang di tentukan secara jelas dan spesifik dan dapat dimengerti pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian anggaran tersebut dalam waktu periode tertentu.

Ketersediaan informasi anggaran yang jelas dan mudah dipahami akan membantu manajer untuk memahami tujuan anggaran dan bagaimana mereka dapat mencapai tujuan tersebut. Hal ini akan meningkatkan motivasi manajer untuk mencapai target anggaran. Selain itu, kejelasan anggaran juga dapat mengurangi ambiguitas dan konflik interpretasi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menyatakan bahwa manajer dan pemilik perusahaan memiliki tujuan yang berbeda. Manajer ingin memaksimalkan kepentingannya sendiri, sedangkan pemilik perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan perusahaan. Ketersediaan informasi anggaran yang jelas dan mudah dipahami dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. Hal ini karena informasi anggaran yang jelas akan membantu manajer untuk memahami tujuan anggaran dan bagaimana mereka dapat mencapai tujuan tersebut.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh RD Kartika yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kartika & Sukanto, 2019). Penelitian serupa dilakukan oleh Sari. W Aminda dan Mohklas menyatakan bahwa kejelasan target anggaran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap senjangan anggaran (W. A. Sari & Mohklas, 2019)

3. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

Hasil penelitian pada variabel Akuntabilitas (X3) diperoleh nilai t-statistic sebesar 13.548 dan signifikansi sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistic lebih besar dari 1.97294 ($13.548 > 1.97294$) serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X3) berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya (Djalil, 2014)

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan anggaran. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Teori *Decision-Usefulness* menyatakan bahwa informasi anggaran yang berguna bagi pengambilan keputusan akan meningkatkan motivasi manajer

untuk mencapai target anggaran. Akuntabilitas dapat meningkatkan kegunaan informasi anggaran melalui peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.

Sejalan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami, Rizky Hayyin dan Tantina Haryati menyatakan bahwa *budgetary goal characteristics*, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan kinerja anggaran berkonsep value for money di BPKPD Kabupaten Pamekasan (Utami & Haryati, 2023). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi P. Nabila, dkk menyatakan bahwa Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Rachmadi et al., n.d.).

4. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Realisasi anggaran melalui Komitmen organisasi sebagai variable moderating

Hasil penelitian variabel Komitmen organisasi (M) dalam memoderasi pengaruh partisipasi anggaran (X1) terhadap realisasi anggaran (Y) diperoleh nilai t-statistic sebesar 0.323 dan signifikansi sebesar 0.747. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistic lebih kecil dari 1.97294 ($0.323 > 1.97294$) serta nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.747 > 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen organisasi (M) tidak dapat memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan.

Komitmen organisasi sebagai sikap loyalitas pegawai terhadap organisasi dengan cara tetap bertahan dalam organisasi, membantu mencapai tujuan organisasi, dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan organisasi dengan alasan apapun (Yusuf, M.R., Syarif, 2018). Kinerja organisasi akan terlihat buruk jika organisasi tersebut tidak mampu menyerap anggarannya secara optimal. Baiknya kinerja sebuah organisasi tidak terlepas dari peranan partisipasi anggarannya. Terlihat dari partisipasi anggarannya yang disebut sebagai Manajemen perusahaan, yang memanfaatkan kemampuan fisik dan psikisnya secara optimal demi mencapai tujuan organisasinya (Anfujatin, 2016)

Komitmen organisasi adalah keterikatan individu dengan organisasi, sehingga individu tersebut merasa memiliki dan berusaha mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, memiliki persepsi yang positif dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Sebaliknya, pegawai dengan komitmen organisasi yang rendah akan memiliki perhatian yang rendah untuk mencapai tujuan organisasi, bahkan cenderung mencoba memenuhi kepentingan pribadi.

Komitmen organisasi merupakan sikap emosional yang dimiliki oleh karyawan terhadap organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen

organisasi yang tinggi akan lebih cenderung untuk mengikuti dan mematuhi kebijakan dan peraturan organisasi, termasuk anggaran. Dalam *Decision-Usefulness Theory* menjelaskan bagaimana partisipasi anggaran dapat meningkatkan kegunaan informasi anggaran, motivasi manajer, dan komitmen manajer terhadap anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harahap, dkk yang menyatakan bahwa proses komitmen organisasi tidak mampu memediasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap realisasi anggaran (Harahap et al., 2020).

5. Pengaruh Kejelasan Sasaran terhadap Realisasi Anggaran Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel Komitmen organisasi (M) dalam memoderasi kejelasan sasaran anggaran (X2) terhadap realisasi anggaran (Y) diperoleh nilai t-statistic sebesar 0,871 dan signifikansi sebesar 0,384. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistic lebih kecil dari 1.97294 ($0.871 > 1.97294$) serta nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0.384 > 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan seberapa jauh anggaran yang ditetapkan secara jelas serta tepat agar dapat mudah untuk dimengerti. Dengan adanya anggaran yang memiliki sasaran yang jelas, maka individu dapat lebih mudah dalam menyusun target-target yang telah ditetapkan. Kemungkinan kesenjangan anggaran dapat dilakukan dengan salah satu cara, yaitu penambahan dana yang berasal dari luar anggaran yang telah ditetapkan semula atau tetap sesuai pada anggaran yang telah ditetapkan seperti semula tetapi kinerja pelaksanaan anggarannya diturunkan. Dengan dilakukannya senjangan anggaran, maka pengalokasian sumber daya menjadi tidak efisien, anggaran yang ditetapkan menjadi tidak efektif, serta fungsi anggaran sebagai alat pengukur kinerja pegawai menjadi tidak berfungsi dengan baik (Abdullah, 2013).

Dalam *Decision-Usefulness Theory* menekankan bahwa tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran dapat memengaruhi realisasi anggaran daerah melalui penyediaan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh realisasi anggaran terhadap kinerja anggaran (Badan et al., 2019)

6. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Realisasi Anggaran Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian pada variabel Komitmen organisasi (M) dalam memoderasi pengaruh akuntabilitas (X3) terhadap realisasi anggaran (Y) diperoleh nilai t-statistic sebesar 1.543 dan signifikansi sebesar 0.123. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-statistic lebih kecil dari 1.97294 ($1.543 > 1.97294$) serta nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.123 > 0.05$). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi (M) tidak dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan.

Akuntabilitas adalah keputusan dan kebijakan yang dipegang oleh organisasi sehingga informasi yang dimuat dapat diakses, dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Akuntabilitas merupakan hal penting dalam menjamin efisiensi dan efektivitas (Budiarto & Puspitasari, 2020). Semakin baik akuntabilitas yang diterapkan semakin baik kinerja anggaran yang dikelola. Akuntabilitas yang berguna akan membantu pembuat keputusan dalam menjalankan operasi dan mengendalikan risiko, yang sejalan dengan tujuan pengendalian anggaran daerah.

Teori Kegunaan Keputusan (*Decision-Usefulness Theory*) dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara akuntabilitas dan realisasi anggaran daerah, serta bagaimana komitmen organisasi mempengaruhi penggunaan informasi akuntabilitas. Menurut teori ini, informasi akuntansi harus berguna dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntabilitas yang disajikan dalam laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk membantu para pemangku kepentingan, termasuk dalam pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Selain itu, komitmen organisasi juga dapat mempengaruhi bagaimana informasi akuntabilitas digunakan, karena organisasi dengan komitmen yang tinggi cenderung lebih memperhatikan dan memanfaatkan informasi akuntabilitas secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi dan pengendalian anggaran daerah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Budiarto & Puspitasari, 2020) Akuntabilitas secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kepada yang mengamatkan kewenangan dan puas terhadap kinerja pelaksanaan. Kinerja tersebut perlu diukur dan dilaporkan guna terciptanya akuntabilitas. Dengan penerapan akuntabilitas yang tinggi maka akan mendorong sebuah instansi untuk mengelola anggarannya secara tepat sehingga sasaran dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai (Utami & Haryati, 2023).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan
2. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan
3. Akuntabilitas berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan
4. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan.
5. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan.
6. Komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap realisasi anggaran pada Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka terdapat saran-saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini terlihat bahwa pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas dalam pemerintahan dalam hal ini pemerintahan Nias Selatan telah baik dilakukan, namun masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya sempurna sehingga hal ini akan berdampak pada rendahnya Realisasi Anggaran
2. Peneliti selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian agar mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.

Bagi instansi yang dalam hal ini pemerintahan Nias Selatan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pertanggungjawabannya terhadap masyarakat atas program-program yang dilaksanakan melalui realisasi anggaran.

5. REFERENSI

- Abdullah, R. S. (2013). *Inovasi Pembelajaran* (Bumi Aksara (ed.)).
- Alimudin Pohan; Muhammad Yafiz. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 551–563.
- Amin, Z. B. M. (2022). *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*,

Vol.14(No. 1), 1–16. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dia/article/view/1014>

- Anggreni, I. G. A. P., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 490–500.
- Atika, D., Junaidi, L. D., & Allia, I. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja Serta Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Medan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(4), 77–90.
- Audia, M. F., & Jatmiko, B. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, Reputasi dan Etika Terhadap Senjangan Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Bantul). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 144–151. <https://doi.org/10.18196/rab.010213>
- Ayem, S., & Nugroho, M. M. (2020). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik, Tingkat Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:235095354>
- Badan, S., Dan, P., Daerah, P., Agung, I. G., & Pratiwi, S. (2019). *I Dewa Made Endiana*. 354–364.
- Basyir, A. A. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri, Dan Kapasitas Individu Terhadap Budgetary Slack Pada Skpd Pemerintah Kota Samarinda. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 13(2), 1–21. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Budiarto, D. S., & Puspitasari, M. D. (2020). Meningkatkan Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money. *Accounting Global Journal*, 4(2), 153–166. <https://doi.org/10.24176/agj.v4i2.5099>
- Dewi, C. K., Iqbal, M. A., & Moh, F. (2019). The Influence of Accountability, Transparency and Organizational Commitments to Village Fund Management in Momunu District, Buol Regency. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformas* (PT Semesta).
- Ghozali, Imam, H. L. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. BP Undip. Semarang/Harnanto. *Akuntansi Biaya: Sistem Biaya Historis*. Yogyakarta: BPFE.
- Ginting, M. C. (2018). Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial Organisasi. *Jurnal Manajemen*, 4(1), 23–33.

- Harahap, S. A. S., Taufik, T., & Azlina, N. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i1.3402>
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- Hidayat, W. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan*. UMM Press. <https://books.google.co.id/books?id=GSxjDwAAQBAJ>
- Iriany Dewi Soleiman, J. H. & N. I. (2023). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Rumah Sakit Pekanbaru. *Jurnal Daya Saing*, 28(2), 235–242. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v2i1.40>
- Jannah, M., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Tujuan Anggaran, Keadilan Distributif dan Pengawasan Internal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(2), 69–90. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i2.3501>
- Joseph F. Hair, Jeffrey J. Risher, Marko Sarstedt, & Christian M. Ringle. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EBR-11-2018-0203/full/pdf?title=when-to-use-and-how-to-report-the-results-of-pls-sem>
- Kartika, R. D., & Sukamto. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Daerah Kota Surabaya). *Liability*, 1(2), 63–83. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/liability/article/view/873>
- Kharisma P, I., Rahayu, S., & Yudi, Y. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Jambi (Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 6(2), 126–135. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i2.14278>
- Lesmono, B. L., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:246339651>
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p20>
- Mardiasmo, M. B. A. A. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Andi Offset. https://books.google.co.id/books?id=6_BBEEAAQBAJ
- Mauliza, S., Astuti, W., & others. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Manajerial Majelis Pendidikan Daerah. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 8(1), 18–26.
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:225663866>
- Pane, D. C., Paula, C., Apriliyani, D., & Ufrida, N. (2021). Pengaruh Profesionalisme, Experience, Akuntabilitas, dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi (MEA)*, 5(2), 312–331.
- Pratiwi, I. G. A. S., Endiana, iDewa M., & Arizona, I. P. E. (2019). Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderas.